



## Analisis Implementasi Kebijakan: Studi Kasus Pengelolaan Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang 2026

Fadhila Muthi'ah Ramadhani<sup>1</sup>, Alsya Aulia Fitriani<sup>2</sup>, Diva Elvia Pupa Ayu<sup>3</sup>,  
Muhammad Zidan Akmalana<sup>4</sup>, Indra<sup>5</sup>, Prisca Kiki Wulandari<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

\*Email Korespodensi: [fadhilamuthiah@student.ub.ac.id](mailto:fadhilamuthiah@student.ub.ac.id)

Diterima: 15-06-2026 | Disetujui: 19-06-2026 | Diterbitkan: 21-06-2026

### ABSTRACT

*Waste management is a crucial challenge for local governments amid the continuously increasing volume of urban waste, including in Malang City, which faces pressure from up to 500 tons of waste entering the Supit Urang Final Disposal Site every day. This study aims to analyze the implementation of waste management policy at the Waste Management Technical Implementation Unit of the Environmental Agency of Malang City in 2026, using George C. Edward III's policy implementation theory as the analytical framework. This research employed a qualitative approach with a case study design through semi-structured interviews, field observations, and documentation. The results show that internal communication runs in a top-down and formalistic manner, but remains weak in transmitting information to the community; fleet resources, human resources, budget, and facilities are still limited compared to the volume of waste that must be processed; the disposition of implementing officers is relatively good, as indicated by work commitment and regular monthly monitoring and evaluation, although it has not been balanced by community participation; and the bureaucratic structure already has a clear division of tasks and standard operating procedures, but the mechanism for reporting public complaints remains layered, thereby slowing down service responses. This study concludes that the implementation of waste management policy in Malang City has worked fairly well in terms of disposition and task structure, but is still constrained by resources and transparency in public communication. These findings provide an empirical contribution at the technical implementation unit level, which has been relatively less studied compared to research at the temporary disposal site level, and serve as a basis for recommendations to strengthen resource capacity and simplify public communication channels.*

**Keywords:** Policy implementation; Waste management; George C. Edward III; Transparency; Accountability.

### ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan tantangan krusial bagi pemerintah daerah di tengah pertumbuhan volume sampah perkotaan yang terus meningkat, termasuk di Kota Malang yang menghadapi tekanan hingga 500 ton sampah masuk ke TPA Supit Urang setiap hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2026, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal berjalan *top-down* dan formalistik, namun lemah dalam transmisi informasi kepada masyarakat; sumber daya armada, sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas masih terbatas dibandingkan volume sampah yang harus diolah; disposisi petugas pelaksana relatif baik, ditunjukkan melalui komitmen kerja dan monitoring-evaluasi rutin bulanan, meskipun belum diimbangi partisipasi masyarakat; serta struktur birokrasi telah memiliki pembagian tugas dan SOP yang jelas, tetapi mekanisme pelaporan keluhan masyarakat masih berlapis sehingga memperlambat respons layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang berjalan cukup baik pada aspek disposisi dan struktur tugas, tetapi masih terhambat pada aspek sumber daya dan transparansi komunikasi publik. Temuan ini memberikan kontribusi empiris pada level unit pelaksana teknis yang relatif belum banyak dikaji dibandingkan studi pada tingkat TPS, serta menjadi dasar rekomendasi penguatan kapasitas sumber daya dan penyederhanaan jalur komunikasi publik.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan; Pengelolaan Sampah; George C. Edward III; Transparansi; Akuntabilitas

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ramadhani, F. M. ., Fitriani, A. A. ., Ayu, D. E. P., Akmalana, M. Z., Indra, I., & Wulandari, P. K. . (2026). Analisis Implementasi Kebijakan: Studi Kasus Pengelolaan Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang 2026. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2075-2088. <https://doi.org/10.63822/61resf94>

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat di kota-kota besar Indonesia telah mendorong peningkatan volume sampah secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menunjukkan produksi sampah meningkat dari sekitar 481 ton per hari pada 2021 menjadi sekitar 680 ton per hari pada 2022–2023, dengan sekitar 140 ton di antaranya belum tertangani secara optimal setiap harinya (Khufat, M. D. S., Warnidasari, R., & Firdaus, B. Z., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Malang masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pengangkutan, pengolahan, dan pengurangan sampah. Peningkatan volume sampah tersebut berdampak pada kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin terbebani. Penumpukan sampah masih sering ditemukan di beberapa TPS akibat keterlambatan pengangkutan maupun tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya. Selain itu, kondisi TPA juga menghadapi tekanan akibat keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2026, jumlah sampah yang masuk per hari dapat mencapai sekitar 500 ton, sedangkan kemampuan petugas dalam melakukan penyortiran hanya sekitar 35 ton dan composting sekitar 15 ton per hari. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara volume sampah dengan kapasitas pengelolaan yang dimiliki pemerintah daerah. Permasalahan lainnya berkaitan dengan efektivitas layanan kebersihan yang masih belum optimal. Masyarakat masih sering mengeluhkan jadwal pengangkutan sampah yang tidak konsisten dan sering mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan penumpukan sampah di TPS maupun lingkungan permukiman. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, armada pengangkut, serta mesin pemilah sampah menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, UPT Pengelolaan Sampah memiliki sekitar 50 armada dan 20 alat berat, seperti excavator, bulldozer, dan loader, namun mesin pemilah sampah masih belum memadai untuk mendukung pengelolaan sampah secara optimal.

Selain persoalan teknis, transparansi pengelolaan sampah juga masih menjadi perhatian penting. Masyarakat masih kurang mengetahui mengenai alur pengelolaan sampah, target pengurangan sampah, hingga mekanisme pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah. Padahal, target pengelolaan sampah sebenarnya telah tercantum dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Rendahnya transparansi informasi tersebut menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana pengelolaan sampah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, aspek akuntabilitas pemerintah daerah juga masih perlu diperkuat, terutama terkait mekanisme evaluasi pelayanan kebersihan dan pertanggungjawaban terhadap keterlambatan pengangkutan sampah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan publik. Penelitian Khufat, Warnidasari, dan Firdaus (2024) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat di Kota Malang. Selain itu, implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut menjadi penting karena menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Risna Dewi et al, 2026). Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengelolaan sampah secara umum dan belum secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, khususnya pada aspek

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan kebersihan.

Secara empiris, pengelolaan sampah di Kota Malang masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber rumah tangga, keterbatasan sumber daya pengelolaan, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat masih cenderung mencampur seluruh jenis sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Selain itu, inovasi seperti bank sampah belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan sampah pemerintah daerah karena sebagian besar masih dikelola oleh pihak swasta atau masyarakat secara mandiri.

Pemilihan UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan unit pelaksana teknis yang berperan langsung dalam pengelolaan sampah di Kota Malang. Selain itu, berbagai permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Malang menunjukkan adanya dinamika implementasi kebijakan yang menarik untuk dikaji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2026 melalui perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan fokus pada transparansi pengelolaan sampah, akuntabilitas petugas pengelolaan sampah, dan efektivitas layanan kebersihan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Teori implementasi kebijakan publik model *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang dikembangkan oleh George C. Edward III menegaskan bahwa keberhasilan eksekusi suatu regulasi ditentukan oleh hubungan kausal antara empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Sunarto, 2021). Hubungan interaktif antarvariabel ini mendikte seberapa optimal kebijakan lingkungan di tingkat daerah ditransformasikan dari instruksi normatif menjadi kinerja operasional riil di lapangan (Edward III, G.C, 1980).

#### 1. Komunikasi

Dalam perspektif teoritis George C. Edward III, komunikasi ditempatkan sebagai variabel determinan pertama yang secara krusial mendikte keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Efektivitas eksekusi di lapangan hanya dapat diraih apabila para aktor pelaksana telah memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai arah tindakan yang harus dilakukan. Dalam memetakan performa variabel komunikasi di atas, orientasi keberhasilan implementasinya diukur secara rigid berdasarkan tiga instrumen determinan, yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

#### 2. Sumber daya

Sumber daya merupakan determinan vital berikutnya yang menentukan efektivitas pengimplementasian sebuah kebijakan publik. Dimensi sumber daya ini diturunkan ke dalam empat elemen operasional utama: staf, informasi, wewenang, fasilitas.

#### 3. Disposisi

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap dari aparat pelaksana merupakan determinan vital ketiga yang secara langsung mempengaruhi derajat keberhasilan implementasi

kebijakan publik. Edward III mengurai variabel disposisi ini ke dalam tiga dimensi operasional yang saling berkaitan: efek disposisi, pengaturan birokrasi, insentif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan determinan keempat yang secara signifikan mempengaruhi derajat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Edward III mengidentifikasi dua karakteristik struktural utama yang dapat mendongkrak performa institusi menuju tata kelola yang lebih optimal, yaitu: membuat *standard operating procedures* (SOP), melaksanakan fragmentasi atau pembagian tugas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, berfokus pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang yang ada di TPU Supit Urang. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara empiris. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu mencakup staf teknis dan staf lapangan UPT yang terlibat langsung dalam operasional harian di TPA Supit Urang.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yakni wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mencakup empat variabel teori kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, observasi dilakukan untuk memperoleh data primer kondisi lapangan, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder serta foto lapangan. Data akan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dilakukan melalui beberapa tahapan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak terkait () dan turun untuk melihat kondisi lapangan secara langsung, tahapan dimulai dengan pengangkutan sampah, pengelolaan tempat penampungan sementara (TPS), pelayanan kebersihan, hingga pengawasan kondisi lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT dan observasi lapangan, pelaksanaan pengelolaan sampah telah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, namun masih ditemukan beberapa kendala teknis maupun administratif yang mempengaruhi efektivitas pelayanan.

Dalam sistem pengangkutan sampah, UPT Pengelolaan Sampah menggunakan armada truk pengangkut yang beroperasi secara terjadwal di beberapa wilayah Kota Malang. Pengangkutan dilakukan dari TPS menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara, jadwal pengangkutan sering mengalami keterlambatan akibat keterbatasan jumlah armada dan tingginya volume sampah harian. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di beberapa TPS, khususnya pada jam-jam tertentu dan di wilayah dengan tingkat produksi sampah yang tinggi.

Selain itu, pengelolaan TPS masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kapasitas TPS yang

terbatas dan kurang optimalnya sistem pemilahan sampah. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar sampah masih tercampur antara sampah organik dan anorganik sehingga menyulitkan proses pengelolaan lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelayanan kebersihan yang diberikan oleh UPT juga belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat, masih terdapat keluhan terkait keterlambatan pengangkutan sampah serta kurang konsistennya jadwal pelayanan kebersihan. Namun demikian, petugas lapangan tetap berupaya menjalankan tugas sesuai prosedur meskipun dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam kondisi lapangan, petugas juga menghadapi hambatan berupa volume sampah yang terus meningkat, kondisi armada yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi kebijakan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang baik. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang masih menghadapi kendala terutama pada aspek sumber daya dan efektivitas operasional di lapangan, sehingga tujuan pelayanan kebersihan yang optimal belum sepenuhnya tercapai.

## Analisis Variabel Implementasi Kebijakan

### 1. Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis empiris di lapangan, variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang tahun 2026 menunjukkan adanya pola komunikasi internal yang sangat hierarkis dan kaku, serta adanya kesenjangan (*gap*) komunikasi eksternal yang masif antara instansi pemerintah dengan masyarakat luas. Merujuk pada kerangka teori George C. Edward III, keberhasilan dimensi komunikasi ini dibedah melalui tiga indikator struktural, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kebijakan.

#### a. Transmisi Informasi Kebijakan

Dimensi transmisi mengukur kelancaran penyaluran informasi kebijakan dari otoritas dinas tingkat atas hingga ke level unit pelaksana teknis operasional harian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak UPT, penyaluran instruksi dan standar kebijakan dari DLH Kota Malang berjalan melalui satu arah yang bersifat *top-down* dan formalistik melalui perantara Kepala Bidang. Informan menegaskan kondisi ini melalui pernyataan berikut:

*"Kami ini sebenarnya baru sudah mulai berubah... Karena kami itu UPT Unit pelaksanaan teknis itu ya Bahasa gampangnya Kami hanya menerima Misalkan Ada pekerjaan ini Kami hanya melakukan itu Karena unit pelaksanaan teknis Jadi kami sama sekali tidak punya kewenangan di dalam menentukan kebijakan Yang menentukan kebijakan dinas..."*

Pernyataan di atas membuktikan bahwa dari segi transmisi, informasi instruksional internal tersampaikan secara lancar, namun polanya sangat membatasi ruang gerak UPT sebagai eksekutor pasif. Akibatnya, terjadi kegagalan transmisi informasi publik yang melahirkan masalah kurangnya transparansi, di mana masyarakat tetap berada dalam kondisi buta informasi mengenai alur, biaya, maupun substansi kebijakan tata kelola lingkungan yang tengah berjalan.

#### b. Kejelasan Instruksi dan Informasi

Indikator kejelasan menuntut agar setiap pesan regulasi dan panduan teknis yang diterima oleh aparatur pelaksana lapangan bersifat definitif, eksplisit, dan bebas dari ambiguitas. Secara internal organisasi, kejelasan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara dinas induk dengan UPT sudah terpetakan secara jelas, sehingga meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan antar petugas.

Namun, ketiadaan edukasi dan kejelasan diseminasi informasi publik dari pemerintah daerah menyebabkan warga keliru dalam memandang esensi kebijakan persampahan. Masyarakat masih memelihara paradigma usang bahwa penanganan sampah sepenuhnya merupakan kewajiban mutlak pemerintah, bukan tanggung jawab individu yang memproduksi sampah tersebut. Di sisi lain, ketidakjelasan alur penanganan komplain operasional juga menjadi batu sandungan. Ketika terjadi penundaan pelayanan kebersihan, masyarakat awam cenderung bingung dan menyalurkan keluhan secara acak, padahal mekanisme pelaporan birokrasi diatur secara kaku dan berlapis. Hal tersebut dipertegas oleh informan sebagai berikut:

*"Setahu saya kalau mekanisme pelaporan itu semua harus masuk dinas dulu jadi meskipun Anda rumahnya dekat sini Anda gak bisa ujung-ujung langsung lihat UPT. Karena satu itu diluar UPT, itu hanya ketika sampah masuk melalui gerbang TPA sampah terpadu..."*

Kutipan wawancara ini membongkar fakta bahwa kejelasan sirkulasi informasi keluhan publik tersumbat oleh rigiditas birokrasi. Prosedur yang mengharuskan setiap aduan masyarakat masuk terlebih dahulu ke dinas induk sebelum diturunkan ke UPT secara substansial melemahkan aspek akuntabilitas dan daya tanggap instansi dalam merespons dinamika lapangan secara cepat.

### c. **Konsistensi Komunikasi Kebijakan**

Dimensi konsistensi mensyaratkan bahwa perintah operasional yang didelegasikan sepanjang linimasa pelaksanaan wajib bersifat ajeg, koheren, dan tidak berubah-ubah demi mencegah disintegrasi fokus para implementor. Di internal birokrasi UPT Pengelolaan Sampah Kota Malang, konsistensi perintah komando dari atasan dinilai cukup stabil karena setiap petugas bergerak secara linier menuruti rantai komando tertulis, sesuai dengan wawancara berikut:

*"ga ada lah mas kita ini cuma menurut perintah aja, gimana mau tumpang tindih. misal dari cuaca kan kalau hujan terus gitu, ini saya berbicara lagi-lagi karena hanya di TPA. Jika anda berbicara di DLH kami tentu saja yang paling baru deh dengan kenaikan harga bahan bakar dari Rp14.000 menjadi Rp29.000 Rp28.000 itu kan sangat berpengaruh terhadap kami, kami tidak bisa bekerja secara optimal karena semua alat gratis ini itu menggunakan bbm non-subsidi, jadi bbm non-subsidi itu dengan kenaikan kemarin yang hampir 100% otomatis juga yang harusnya (misalnya) kita bisa beli Rp1.000 kan akhirnya karena harganya naik kita cuma bisa beli Rp500 sekarang kalau misalkan itu terjadi harusnya kita kerja sebulan terus kita kerja 15 hari, tapi bagaimana sampah yang di tps-tps bisa tidak diambil dan lain sebagainya kan pasti efeknya domino. Kalau kita di sini berhenti nanti di TPS dan seterusnya tidak bisa membuang ke sini. Di TPS sampahnya menunggu akhirnya warga kembali jadi seperti itu."*

Kendati demikian, konsistensi ini mengalami kerapuhan yang fatal ketika dihadapkan pada fluktuasi faktor eksternal organisasi dan keterbatasan sumber daya fisik. Ketika terjadi lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi untuk alat berat operasional hingga mencapai hampir 100 persen, terjadi ketidakkonsistenan antara target pelayanan yang diinstruksikan dinas dengan

kemampuan riil eksekusi logistik di lapangan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, maupun sarana pendukung lainnya (Edward III, G.C., 1980).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Jumlah armada yang tersedia dinilai belum sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya. Selain jumlah armada yang terbatas, beberapa kendaraan operasional juga mengalami kerusakan dan membutuhkan perawatan berkala sehingga menghambat proses pengangkutan sampah secara optimal.

Selain keterbatasan armada, sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah petugas kebersihan dan pengangkut sampah dinilai belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja petugas menjadi lebih berat, terutama pada wilayah dengan tingkat produksi sampah tinggi. Di sisi lain, peningkatan volume sampah yang terus terjadi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga kerja secara signifikan.

Dari aspek anggaran, pihak UPT menyampaikan bahwa keterbatasan dana operasional turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah. Anggaran yang tersedia harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, seperti perawatan armada, pengadaan fasilitas, operasional pengangkutan, serta kebutuhan administrasi lainnya. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada lambatnya pengadaan sarana baru dan kurang optimalnya pemeliharaan fasilitas yang sudah ada.

Sementara itu, dari segi fasilitas, masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti kapasitas TPS yang terbatas, kurangnya tempat pemilahan sampah, serta fasilitas pendukung operasional yang belum memadai. Berdasarkan observasi lapangan, kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan sampah berjalan kurang efektif dan berpotensi menimbulkan penumpukan sampah di beberapa titik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan sampah dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana, armada pengangkut, anggaran, serta kualitas SDM pengelola. Selain itu, penelitian Permatasari dan Setyanto juga menunjukkan bahwa aspek teknis dan kelembagaan menjadi faktor utama dalam keberhasilan operasional TPS 3R (Permatasari, A. D., & Setyanto, D., 2025)

Penelitian lain oleh Lupiyanto dkk. juga menunjukkan bahwa monitoring, evaluasi, serta keterbatasan kelembagaan menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan lingkungan TPS-3R (Lupiyanto, R., Nurhasanah, N., & Hamzah, H. P., 2023). Melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang, baik dari aspek armada, SDM, anggaran, maupun fasilitas pendukung lainnya.

## 3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan tanggung jawab pelaksana kebijakan dalam

menjalankan tugas dan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesediaan dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan secara konsisten. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Malang, disposisi dapat dilihat dari komitmen petugas lapangan, respons terhadap masyarakat, serta pelaksanaan tugas pengelolaan sampah di TPA Supit Urang.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak UPT Pengelolaan Sampah menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah meskipun menghadapi berbagai keterbatasan operasional. Petugas tetap melakukan pengelolaan sampah setiap hari melalui kegiatan pemilahan, pengomposan, pengolahan air lindi, dan penataan landfill agar sampah tidak mencemari lingkungan sekitar (Hardiana, S., Susanti, A., & Hamid, A., 2024).

Informan menyampaikan:

*“Tujuan kami mengolah sampah di TPA agar sampah tersebut tidak mencemari lingkungan.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan dan berupaya menjalankan tugas sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu, petugas lapangan juga tetap menjalankan pelayanan kebersihan meskipun jumlah sampah yang masuk ke TPA terus meningkat setiap harinya.

Berdasarkan hasil wawancara, volume sampah yang masuk ke TPA Supit Urang mencapai sekitar 500 ton per hari. Akan tetapi, kemampuan pengolahan sampah yang dimiliki UPT masih terbatas sehingga petugas harus bekerja secara maksimal untuk mengelola sampah yang ada (Rohdianto, R., Novaria, R., & Soesiantoro, A., 2024).

Selain komitmen petugas, disposisi juga terlihat dari adanya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil wawancara, evaluasi dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali untuk mengetahui kendala operasional dan menilai kinerja petugas di lapangan.

Informan menyampaikan:

*“Kami melakukan monitoring dan evaluasi satu bulan sekali terhadap kinerja teman-teman di lapangan.”*

Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah tetap berjalan sesuai prosedur dan target operasional yang telah ditentukan (Yacadewa, A., & Musa’ad, M., 2021).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, disposisi pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga.

*“Kesadaran masyarakat kita memang masih rendah. Mau tidak mau memang harus berubah.”*

Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja petugas menjadi lebih berat karena proses pemilahan sampah harus dilakukan kembali di TPA secara manual. Selain itu, masih adanya sampah liar di beberapa titik juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya didukung oleh partisipasi masyarakat (Alimi, F, et al., 2024).

Berdasarkan teori George C. Edward III, disposisi pelaksana kebijakan dalam implementasi pengelolaan sampah di Kota Malang dapat dikatakan cukup baik karena petugas tetap menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Akan tetapi, keberhasilan implementasi kebijakan masih memerlukan dukungan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, Standard Operating Procedure (SOP), mekanisme koordinasi, pengawasan, serta evaluasi internal dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksanaan tugas dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan antarunit pelaksana kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang, struktur birokrasi terlihat melalui pembagian tugas antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang dengan UPT Pengelolaan Sampah sebagai unit pelaksana teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis empiris di lapangan, struktur birokrasi pengelolaan sampah di Kota Malang telah memiliki pembagian tugas yang cukup jelas antara dinas induk dan unit pelaksana teknis. Pihak UPT menegaskan bahwa kewenangan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis sepenuhnya berada pada DLH Kota Malang, sedangkan UPT hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis operasional di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang. Hal tersebut disampaikan informan sebagai berikut:

“Kami ini hanya unit pelaksana teknis. Yang menentukan kebijakan itu dinas.”

Selain itu, pembagian tugas juga terlihat pada sistem pengangkutan sampah yang berada di bawah bidang tersendiri di lingkungan DLH Kota Malang. UPT Pengelolaan Sampah hanya berfokus pada pengelolaan sampah yang telah masuk ke kawasan TPA. Informan menyampaikan:

“Pengangkutan sampah itu ranahnya bidang sendiri. Kami di sini fokus di pengolahan sampah di TPA.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah telah memiliki spesialisasi tugas sesuai fungsi masing-masing unit kerja. Menurut Edward III (1980), pembagian tugas yang jelas dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan karena setiap pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks penelitian ini, pembagian fungsi antara DLH dan UPT dinilai mampu meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Dari aspek SOP, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan operasional pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan oleh dinas. UPT sebagai pelaksana teknis menjalankan kegiatan pemilahan sampah, pengomposan, pengelolaan air lindi, serta penataan landfill sesuai mekanisme kerja yang berlaku di TPA Supit Urang. SOP tersebut juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dilakukan secara rutin melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Informan menyampaikan:

“Kami melakukan monitoring dan evaluasi satu bulan sekali terhadap kinerja teman-teman di lapangan.”

Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kendala operasional, mengevaluasi kinerja petugas, serta memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan sesuai prosedur operasional

yang telah ditentukan. Menurut penelitian Lupiyanto dkk., monitoring dan evaluasi internal merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan lingkungan karena dapat membantu meningkatkan efektivitas operasional dan pengawasan pelayanan publik (Lupiyanto, R., Nurhasanah, N., & Hamzah, H. P., 2023).

Selain pengawasan internal, struktur birokrasi pengelolaan sampah di Kota Malang juga melibatkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan kebersihan lingkungan dan sampah liar. Berdasarkan hasil wawancara, DLH melakukan koordinasi dengan Satpol PP, kelurahan, dan organisasi perangkat daerah lainnya dalam kegiatan kerja bakti, pembersihan sungai, dan pengawasan titik pembuangan sampah liar. Informan menyampaikan:

“Kalau kerja bakti atau bersih-bersih sungai kami berkoordinasi dengan Satpol PP dan instansi lain.”

Koordinasi lintas instansi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan kerja sama antarorganisasi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Rohdianto, Novaria, dan Soesiantoro (2024) yang menyatakan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan dan pelayanan publik.

Meskipun struktur birokrasi telah berjalan cukup jelas, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa hambatan birokratis dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang. Salah satu hambatan utama terletak pada mekanisme pelaporan masyarakat yang masih bersifat birokratis dan berlapis. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh laporan masyarakat terkait permasalahan sampah harus terlebih dahulu masuk ke DLH sebelum diteruskan kepada UPT Pengelolaan Sampah.

Informan menyampaikan:

“Kalau mekanisme pelaporan itu semua harus masuk dinas dulu. Jadi masyarakat tidak bisa langsung ke UPT.”

Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan beberapa keluhan masyarakat menjadi kurang cepat karena harus melewati tahapan administrasi birokrasi terlebih dahulu. Selain itu, petugas UPT juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga diperlukan koordinasi dengan Satpol PP dan aparat wilayah setempat.

Berdasarkan teori George C. Edward III, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan kompleks dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan karena memperlambat proses pengambilan keputusan dan respons terhadap permasalahan lapangan. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi pengelolaan sampah di Kota Malang sebenarnya telah memiliki pembagian tugas, SOP, dan sistem pengawasan yang cukup jelas. Akan tetapi, efektivitas implementasi kebijakan masih memerlukan penyederhanaan mekanisme koordinasi dan pelaporan agar pelayanan publik dalam pengelolaan sampah dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan optimal.

### **Faktor Penghambat & Faktor Pendukung**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dipengaruhi beberapa faktor yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor penghambat dan pendukung. Pengelompokan ini merujuk pada empat variabel implementasi kebijakan George C. Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelayanan kebersihan di lapangan.

## 1. Faktor Penghambat

### a. Keterbatasan Armada dan Fasilitas Pendukung

Hambatan utama yang ditemukan di lapangan adalah keterbatasan jumlah armada pengangkut, kondisi kendaraan yang sering mengalami kerusakan, serta minimnya mesin pemilah sampah. Hasil ini selaras dengan penelitian Permatasari dan Setyanto yang menunjukkan bahwa aspek teknis dan kelembagaan, termasuk kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor penentu keberhasilan operasional fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R (Permatasari, A. D., & Setyanto, D., 2025). Keterbatasan kelembagaan dan minimnya monitoring sarana juga berdampak langsung pada kinerja pengelolaan lingkungan di tingkat TPS (Lupiyanto, R., Nurhasanah, N., & Hamzah, H. P., 2023).

### b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Jumlah petugas belum sebanding dengan volume sampah dan keterbatasan anggaran operasional yang terasa akibat kenaikan harga BBM non subsidi memperlambat proses pengangkutan dan pengolahan sampah. Variabel sumber daya menyumbang kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi, sementara struktur birokrasi justru menjadi pengaruh terbesar dibandingkan ketiga variabel lainnya (Ananda, R. G. (2025). Temuan tersebut memperkuat indikasi bahwa keterbatasan sumber daya fisik dan finansial berkaitan erat dengan kapasitas struktural organisasi pelaksana, bukan hanya persoalan teknis.

### c. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kebiasaan masyarakat yang masih mencampur sampah tanpa pemilahan sejak dari rumah tangga menambah beban kerja petugas di TPA. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat serta rendahnya nilai ekonomis sampah menjadi faktor penghambat utama dalam mendorong partisipasi masyarakat melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Hal tersebut memperlihatkan bahwa masalah masyarakat di Kota Malang bersifat persisten dan belum banyak berubah meskipun program-program partisipatif berjalan cukup lama.

## 2. Faktor Pendukung

### a. Komitmen dan Disposisi Petugas Pelaksana

Petugas UPT menunjukkan komitmen yang konsisten dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan operasional, ditunjukkan oleh kesediaan mereka melaksanakan pemilahan, pengomposan, pengolahan air lindi, dan penataan landfill setiap hari demi mencegah pencemaran lingkungan. Komitmen ini sejalan dengan dimensi *effect of disposition* dalam teori Edward III (1980), yang menekankan bahwa kesediaan psikologis pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai arah yang dikehendaki menjadi prasyarat keberhasilan implementasi. Sikap proaktif petugas ini berfungsi sebagai faktor penyeimbang atas keterbatasan sumber daya fisik yang dihadapi UPT.

### b. Pengawasan Internal yang Rutin

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja petugas yang dilakukan secara rutin setiap bulan menjadi faktor pendukung penting karena memungkinkan UPT mendeteksi kendala operasional secara berkala dan menjaga konsistensi pelaksanaan tugas sesuai SOP. Praktik ini relevan dengan temuan Lupiyanto dkk. (2023), yang menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi internal merupakan instrumen penting dalam menjaga efektivitas operasional dan pengawasan

pelayanan publik pada fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R.

c. Kejelasan Pembagian Tugas dan Koordinasi Lintas Instansi

Pembagian fungsi yang tegas antara DLH sebagai pembuat kebijakan dan UPT sebagai pelaksana teknis operasional di TPA, ditambah koordinasi rutin antara DLH, Satpol PP, dan kelurahan dalam kegiatan kerja bakti maupun penanganan sampah liar, turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Kejelasan struktur ini sejalan dengan karakteristik fragmentasi struktur birokrasi yang dikemukakan Edward III (1980), yang menyatakan bahwa pembagian tanggung jawab ke unit-unit spesifik dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2026 telah berjalan, namun belum optimal jika ditinjau melalui keempat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Pada variabel komunikasi, penyaluran informasi internal antara DLH dan UPT berjalan lancar melalui jalur komando yang jelas, tetapi bersifat *top-down* dan formalistik sehingga membatasi ruang diskresi UPT; sementara transmisi informasi kebijakan kepada masyarakat masih lemah karena bergantung pada platform SIPSN yang sulit diakses warga, sehingga transparansi pengelolaan sampah kepada publik belum tercapai secara optimal. Pada variabel sumber daya, UPT menghadapi keterbatasan armada, sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang tidak sebanding dengan volume sampah yang harus diolah setiap hari, diperparah oleh lonjakan harga bahan bakar non-subsidi yang menekan kapasitas operasional secara signifikan. Pada variabel disposisi, petugas pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang relatif baik dalam menjalankan tugas meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, didukung oleh praktik monitoring dan evaluasi internal yang rutin. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan masih terkendala oleh rendahnya disposisi masyarakat, khususnya dalam hal kesadaran memilah sampah sejak dari sumber. Pada variabel struktur birokrasi, pembagian tugas antara DLH dan UPT telah terstruktur jelas melalui SOP dan fragmentasi fungsi, serta didukung koordinasi lintas instansi dengan Satpol PP dan kelurahan. Akan tetapi, mekanisme pelaporan keluhan masyarakat yang masih harus melalui DLH sebelum diteruskan ke UPT memperlambat respons layanan dan melemahkan akuntabilitas instansi terhadap dinamika lapangan.

Secara keseluruhan, akuntabilitas petugas pengelolaan sampah dapat dikategorikan cukup baik dari sisi pelaksanaan tugas teknis, tetapi efektivitas layanan kebersihan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan rigiditas jalur komunikasi-pelaporan. Temuan ini memperkuat sekaligus melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang sebagian besar berfokus pada level TPS atau pendekatan normatif makro, dengan memberikan bukti empiris baru pada level unit pelaksana teknis tingkat TPA.

## SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, Dinas

Lingkungan Hidup Kota Malang perlu memperluas kanal komunikasi publik yang lebih mudah diakses masyarakat di luar platform SIPSN, misalnya melalui media sosial resmi atau papan informasi di tingkat kelurahan, agar transparansi target dan mekanisme pengelolaan sampah dapat dipahami secara luas. Kedua, perlu dilakukan penambahan dan pemeliharaan armada serta mesin pemilah sampah secara berkala, disertai skema anggaran cadangan yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar non-subsidi. Ketiga, mekanisme pelaporan keluhan masyarakat sebaiknya disederhanakan misalnya melalui kanal pelaporan langsung ke UPT atau aplikasi terintegrasi untuk mempercepat respons layanan kebersihan tanpa mengabaikan jalur koordinasi formal dengan dinas induk. Keempat, perlu penguatan edukasi dan insentif bagi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber rumah tangga, mengingat disposisi masyarakat menjadi faktor eksternal yang signifikan memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas unit analisis dengan membandingkan implementasi kebijakan pada beberapa UPT/TPA di kota lain, serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat secara lebih terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. G. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (INOVASI)*, 5(1), 638–648 <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5377>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fariz, R. D. A., Muis, R., Anggraini, N., Rachman, I., & Matsumoto, T. (2024). Good environmental governance roles in sustainable solid waste management in Indonesia: A review. *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, 8(1), 45–56. <https://doi.org/10.23969/jcbeem.v8i1.12035>
- Khufat, M. D. S., Warnidasari, R., & Firdaus, B. Z. (2024). Pengaruh manajemen sistem pengelolaan sampah terhadap peningkatan mutu pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2013–2028. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.2912>
- Kosaza, S., Setiyono, B., & Wijayanto. (2022). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 34–61. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/35433>
- Lupiyanto, R., Nurhasanah, N., & Hamzah, H. P. (2023). Analisis kinerja pengelolaan lingkungan TPS3R perkotaan (Studi kasus: TPS3R Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY). *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 8(4), 927–939. <https://doi.org/10.28926/briliant.v8i4.1573>
- Permanasari, T., dkk. (2026). Rekonstruksi program Adipura sebagai instrumen good environmental governance dalam pengelolaan sampah daerah. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(2).
- Permatasari, A. D., & Setyanto, D. (2025). Evaluation operational of reduce reuse recycle waste treatment facility (TPS 3R) in Bandung City (Case study: TPS 3R Saling Asih and TPS 3R Hikmah). *Engineering, MATHematics and Computer Science (EMACS) Journal*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.21512/emacsjournal.v7i1.12694>
- Sunarto. (2021). *IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG KEARSIPAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II*. Volume 3 Nomor 2 Edisi Maret 2021. Palembang, Sumatera Selatan